

LAMPIRAN

1. Kebijakan Pemakaian Jilbab di Aceh: Antara Syariah dan Politik Kekuasaan

Nilai merupakan masalah yang pelik. Hal ini menyangkut permasalahan etis, aturan politis dan kebijakan. Ideologi adalah perjuangan nilai-nilai, multikulturalisme diwujudkan dengan sikap ideologis yang memberi hak pada minoritas untuk mengakomodir segala nilai yang dianutnya. Nilai seharusnya tanpa paksaan. Namun juga mengandung tirani dan nexus kekuasaan. Karena di dalam dirinya nilai mengandung ketidaksadaran yang nyata-nyata dikonstruksi oleh suatu tatanan simbolik. Maka menurut habermas permasalahan nilai harus diselesaikan dalam sebuah diskursus etis yang tujuannya adalah mencapai pemahaman bersama. Namun akan selalu ada nilai-nilai yang dominan dan nilai-nilai yang didominasi, hal ini tentu saja guna melanggengkan budaya dominan sehingga pemakaian kekerasan tidak asing lagi. Dalam proses mempertahankan itu selalu ada *symbolic violence*.

Dalam kasus ini mengandung dua permasalahan berbeda namun kontroversial baik secara etis maupun politis. Aceh melakukan kebijakan hukum syariah dengan mewajibkan warga negaranya khususnya perempuan menggunakan jilbab atau menutup seluruh tubuhnya. Hal ini politis dan berhubungan langsung dengan jaringan kekuasaan. Kebijakan ini dipertahankan karena kultur dominan dari populasi yang sebagian besar islam. Artinya minoritas terabaikan dan multikulturalisme otomatis regresif. *Multiculturalism means cultural diversity and that diversity can either be good thing, leading to integratrion, or a bad thing, leading to separatism. It is the social and political context that determines in which directions multiculturalism develops.* Artinya diversity itu sendiri tidak dimungkinkan di Aceh karena ketakutan akan adanya separatisme. Kebijakannya pun tidak menghargai perbedaan nilai karena kaum non-muslim pun harus mengikuti aturan syariah yang ada. Wilayah politik tidak dapat diklarifikasi.

Di dalam politik tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kelompok tertentu yang memaksakan kerangka pikirnya ke dalam masyarakat. Karena itu diperlukan *reasonable pluralism* dimana doktrin komprehensif tidak dapat masuk ke dalam konsensus politik. *Reasonable pluralism* bekerja untuk menciptakan standar rasional di dalam berbagai permasalahan keberagaman nilai. *Reasonable pluralism* adalah irisan epistemik dari berbagai faham maupun aliran politik yang dipilih oleh masyarakat dari berbagai golongan. Di dalam kasus Aceh harus dibedakan antara *the use of public reason* dengan *public use of reason*.

Masyarakat cenderung memilih nilai yang tidak berkonflik karena itu sebisa mungkin di dalam konsensus politik terdapat rasionalitas. Tentunya ketika menciptakan kebijakan partisipan berpegang pada rasionalitas publik bukan pada kepercayaan yang dianutnya. Namun hal ini berbenturan dengan kepercayaan kelompok mayoritas yaitu islam di Aceh sehingga mempengaruhi juga kebijakan yang dibuat. Menciptakan politik harus rasional dengan tidak memaksakan kepercayaan tertentu untuk dijadikan kebijakan politik apalagi yang mendiskriminasi perempuan. Lambat-laun rasionalitas yang digunakan di dalam kerangka politik akan disebarkan kepada publik dan menciptakan opini yang berbeda. Afirmasi kebijakan menggunakan jilbab pada akhirnya bergantung pada rasio komunal dimana mayoritas yaitu agama islam menyetujuinya. Masyarakat tentunya dibangun oleh standar, prinsip, dan landasan moral yang berbeda. Karena itu menciptakan rasionalitas politik bergantung pada siapa yang mayoritas dan siapa yang minoritas.

2. Gunung Es Persoalan TKW di Indonesia

Kasus penganiayaan TKW yang bernama Siti Hajar di Malaysia juga mengingatkan kita tentang buruknya perlindungan TKI di luar negeri. Kasus penganiayaan tersebut kerap kali berulang. Siti Hajar menambah panjang daftar TKI yang mengalami perlakuan tidak manusiawi di negeri orang. Data dari Migrant Care mengatakan bahwa puluhan ribu kasus yang menimpa TKI per tahun, mulai dari penipuan, pelecehan seksual, pemerkosaan dan penyiksaan, yang bahkan berujung pada kematian. Tahun lalu, 700 TKI meninggal di Malaysia dan ada 175 TKI lain terancam hukuman mati. Kenyataan bahwa 80

persen TKI dari 6 juta TKI yang dikirim merupakan tenaga tak terampil yang menunjukkan kurang seriusnya pemerintah dalam meningkatkan kualitas TKI. Rendahnya keterampilan TKI membuka peluang terjadinya praktik perbudakan modern atau perdagangan manusia, karena mereka lebih banyak tersedot di sektor informal. (Kompas: 17 Juni 2009)

Perempuan lebih banyak menjadi korban dibanding agen perubahan yang mampu menentukan keputusan bagi kesejahteraannya. Misalnya, pada kasus trafiking, perempuan selalu menjadi korban dan duduk pada posisi yang lemah. Ketidakmampuan perempuan untuk mengakses pendidikan membuat mereka memiliki bargaining position yang lemah di dalam industri. Sebagian mereka melakukan pekerjaan dengan upah rendah dan gaji yang jauh di bawah laki-laki. Hak-hak perempuan bahkan tidak pernah diperhatikan apalagi ketika mereka bekerja sebagai PJTKI.

Penganiayaan TKI merupakan masalah perempuan dunia ketiga yang hidup di dalam kondisi kebijakan ekonomi yang dipengaruhi oleh negara dunia pertama. Akibat ketertinggalan ekonomi suatu negara maka kondisi kemanusiaannya menurun sehingga mengakibatkan rentannya praktek perdagangan maupun eksploitasi manusia. Selama ini negara dunia ketiga selalu dianggap sebagai lahan untuk dieksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Negara dunia ketiga merupakan penghasil bahan mentah yang diekspor ke luar negeri setelah itu dijadikan lagi barang konsumsi yang disebarkan ke negara dunia ketiga. Dari sudut ekonomi globalisasi menciptakan dekolonisasi bagi negara dunia ketiga. Kita tidak dapat memungkiri bahwa selama ini terdapat kekuasaan yang timpang antara negara dunia ketiga atas negara dunia pertama perihal ekonomi hanya karena negara dunia ketiga merupakan bekas jajahan. Hal ini berpengaruh pada kekuatan diplomasi Indonesia yang lemah karena posisi geopolitik yang tidak menguntungkan.

Masalah kemiskinan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh ketidaksetaraan gender. Hal ini bisa dilihat dari peran perempuan yang masih sedikit jumlahnya di dalam pembangunan maupun rencana pengentasan kemiskinan. Padahal potensi perempuan bisa dikatakan sama dengan laki-laki.

Namun sebagian potensi tersebut begitu saja diabaikan. Perempuan menjadi inferior ketika mereka dibatasi aksesnya dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun politik. Terdapat *inequality distribution* di dalam perbedaan pendapatan perempuan yang masih lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini menimbulkan ketidakadilan sehingga perempuan memiliki lebih sedikit pilihan dibanding laki-laki. Memiliki lebih sedikit pilihan berarti mengeliminir kebebasan karena itu pula mengeliminir kesejahteraan. Ketidakmampuan seseorang mengaktualisasikan *capability to function* akan menyebabkan ketiadaan kesejahteraan.

Sebagai negara berkembang Indonesia kekurangan devisa sehingga mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Kondisi Indonesia sebagai negara yang secara ekonomi terus bergantung pada belas kasihan negara dunia pertama melalui uluran tangan bank dunia melumpuhkan posisi kekuasaan. Akibatnya berbagai kasus kekerasan terhadap TKI terus berulang. Masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Kebanyakan oknum pemerintah memilih tutup mata atas kasus TKI karena berbenturan dengan kepentingan ekonomi. Padahal TKI menyumbang hampir Rp. 100 triliun devisa negara tahun lalu dan mulai ditargetkan lagi mencapai Rp. 168 triliun. Dalam hal ini perempuan tidak saja mengalami penindasan ekonomi oleh majikannya tetapi juga penindasan seksual dan penyiksaan. Tidak hanya perempuan menjadi kelompok *subaltern* tetapi juga mengalami penindasan ganda sebagai *self shadow*.

Lemahnya diplomasi terkait pada MOU yang dilakukan oleh negara kita dengan negara tujuan yang kebanyakan merugikan TKI. Kecenderungan pemerintah untuk melepaskan tanggung jawab pada PJTKI membuat TKI secara individual kehilangan kekuatan hukum. Badan Nasional dan Penempatan TKI kurang efisien walaupun memiliki wewenang yang besar yaitu di bawah langsung presiden. Posisi kontrak yang timpang atau merugikan berasal dari posisi politik dan ekonomi yang lemah. Namun, pemerintah bisa melakukan negosiasi maupun bersikap tegas terhadap negara yang melakukan kekerasan.